

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Mediasi Perbankan.....	11
1. Pengertian dan ciri pokok mediasi	11
2. Unsur-unsur utama mediasi	12
3. Tinjauan mediasi perbankan di Indonesia.....	13
B. Tinjauan Umum Sengketa Perdata dan Pidana Perbankan	16
1. Hubungan hukum perdata dengan hukum perbankan	16
2. Sengketa perdata di bidang perbankan.....	18
3. Hukum pidana dan sistem pemidanaan perbankan	19
4. Gabungan perkara pidana dan perdata	22

C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	26
1. Tinjauan umum Otoritas Jasa Keuangan.....	26
2. Perlindungan konsumen jasa keuangan di daerah.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Bahan Penelitian	31
1. Penelitian lapangan.....	31
2. Penelitian kepustakaan.....	31
C. Cara dan alat pengumpulan data	33
1. Lokasi penelitian.....	33
2. Penentuan responden dan narasumber.....	33
3. Teknik pengambilan sampel.....	34
4. Alat pengumpul data.....	34
D. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pelaksanaan mediasi perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan	37
1. Mediasi perbankan Indonesia di masa transisi.....	37
2. Mediasi perbankan dalam mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen OJK.....	43
a. Tahap penerimaan.....	45
b. Tahap verifikasi administrasi.....	46
c. Tahap verifikasi lanjutan.....	47
d. Tahap fasilitasi dan mediasi.....	48
e. Tahap selesainya fasilitasi dan mediasi.....	49
3. Mekanisme mediasi perbankan di Kantor OJK Daerah Yogyakarta.....	50
a. Ketentuan umum mediasi perbankan.....	51
b. Kualifikasi, kewenangan dan tugas mediator.....	53

c.	Prosedur mediasi perbankan di OJK Daerah Yogyakarta	55
	1) Tahap awal.....	55
	2) Tahap perundingan	59
	3) Tahap berakhirnya mediasi.....	60
	4) Lain-lain	60
4.	Kasus-kasus dalam pelaksanaan mediasi perbankan di OJK Daerah Yogyakarta.....	62
	a. Kasus sengketa pelelangan agunan tanah dan bangunan.....	62
	b. Kasus sengketa <i>bank guarantee</i>	63
	c. Kasus sengketa hilangnya dana pada rekening bank nasabah.....	63
5.	Kendala dalam pelaksanaan mediasi perbankan	64
	a. Ruang mediasi yang terbatas.....	64
	b. Itikad baik menentukan kepastian hukum mediasi.....	65
	c. Posisi nasabah yang lemah sebagai konsumen.....	67
	d. Dukungan advokat/kuasa hukum dalam proses mediasi	68
B.	Pelaksanaan Sengketa Perdata Beraspek Pidana di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Yogyakarta	70
1.	Gambaran kasus perdata beraspek pidana di bidang perbankan.....	70
	a. Sengketa di bidang perizinan pendirian (legalitas) bank.....	71
	b. Sengketa di bidang rahasia bank (<i>secrery of banker's</i>).	71
	c. Sengketa di bidang jasa- jasa perbankan.....	72
	d. Sengketa di bidang sarana komputer perbankan	75
	e. Sengketa akibat penyalahgunaan dana nasabah (<i>misapropriation of public funds</i>).	76
2.	Paradigma mediasi dalam menyelesaikan kasus perdata dan pidana	78
	a. Kebijakan masyarakat internasional mengenai mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana	80
	b. Kebijakan di Indonesia mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara pidana.....	95

1) Pelanggaran hukum pidana maupun pidana adat diselesaikan melalui lembaga adat ...	95
2) Pasal 82 KUHP sebagai alasan penghapusan tuntutan delik	99
3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan	101
4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai <i>ultimum remedium</i>	104
5) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnyanya untuk melakukan diskresi.....	105
6) Penghentian proses ke pengadilan (<i>Deponering</i>) oleh Jaksa Agung	110
c. Penyelesaian kasus perbankan dalam sengketa perdata beraspek pidana melalui mediasi perbankan.....	115
3. Praktik penyelesaian sengketa perdata beraspek pidana dalam Mediasi Perbankan OJK Daerah Yogyakarta	122
a. Jalur penyelesaian sengketa perdata terpisah dengan penyelesaian perkara pidana	123
b. Status mediasi informal di Kantor OJK Daerah Yogyakarta	124
c. Prinsip kerahasiaan di dalam mediasi	125
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	137
Lampiran Foto Kondisi Ruang Mediasi OJK Daerah Yogyakarta	137
Lampiran Form Layanan Konsumen Kantor OJK Daerah Yogyakarta	138
Lampiran Berkas Penelitian.....	139
Riwayat Hidup Penulis	140